

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (LRA DAN CALK) PADA
KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BATANGHARI
(Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah)**

Muthmainnah

Jurusan Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Graha Karya Muara Bulian

ABSTRAK

Penulisan jurnal Analisis Penyajian Laporan Keuangan (LRA Dan CALK) Pada Kantor Penegelola Data Elektronik Kabupaten Batanghari (*Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*). Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua digunakan Metode Deduktif yaitu data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa kembali dengan menggunakan teori-teori yang berlaku sebagai alat analisis yang berguna dalam mengambil suatu kesimpulan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada Kantor Penegelola Data Elektronik Kabupaten Batanghari setelah dilakukan analisis penyajian laporan keuangan (LRA dan CALK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Proses Penyajian laporan keuangan LRA dan Calk pada Kantor Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Batanghari tidak mencantumkan belanja tak terduga pada kolom LRA. Selanjutnya Penyajian Belanja Barang dan Jasa angka yang ada di LRA tidak sesuai dengan angka Belanja Barang dan Jasa pada Calk. Proses Penyajian laporan keuangan LRA dan Calk pada Kantor Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Batanghari belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kata kunci : Penyajian, Keuangan, Deduktif, Akuntansi.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke-IV, terdapat cita-cita bangsa Indonesia yang salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia seperti memberi kebebasan (otonomi) kepada Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan menjalankan roda pemerintahan.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, Pemerintah Indonesia berharap kesejahteraan rakyat lebih dapat di tingkatkan, mengingat semakin sulitnya persaingan ekonomi dalam menghadapi globalisasi. Dan dengan adanya otonomi daerah pula, Pemerintah Daerah menjadi lebih leluasa dan berkuasa dalam mengambil keputusan/kebijakan-kebijakan baik yang berbau politik maupun non politik khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.

Akuntansi secara umum (Komersial) adalah seni atau proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran atau penilaian, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dari kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya dan pengkomunikasian informasi yang bersifat ekonomis serta penyajian laporan yang digunakan untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh Pengguna informasi tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi (pemerintahan) didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya

Mengingat pemahaman mengenai akuntansi sangat di butuhkan, demi terciptanya keseragaman dalam penyusunan Laporan Keuangan yang baik maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, serta menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi Anggaran, SAL, Arus Kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan entitas pelaporan meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Arus Kas, (5) Laporan Operasional, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Kantor Pengelola Data Elektronik merupakan kantor yang mengelola data-data elektronik. Pada tahun 2016 bendahara Kantor Pengelola Data Elektronik menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan komponen laporan keuangan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, namun terlihat dari hasil kinerja penyajian laporan keuangan pada tahun 2016 penulis menemukan dua kesalahan penyajian yang dilakukan oleh Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Batanghari.

Pertama, terlihat pada Laporan realisasi Anggaran, Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Batanghari Dalam melakukan Format penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pengelola Data Elektronik tidak mencantumkan beberapa rekening seperti, Pendapatan, Belanja Tidak Terduga, transfer dan Pembiayaan, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ada didalam LRA dijelaskan bahwa LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Masalah yang kedua terjadi pada CALK yang merupakan penjelasan dari Pos-pos Laporan Keuangan. Terlihat dari penjelasan tersebut pos Belanja Barang dan Jasa nilai angka yang tercantum dalam CALK tidak sesuai dengan yang tercantum pada LRA yaitu pada LRA tahun 2016 anggaran Belanja Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp.2.383.750.574 dan kemudian pada CALK nilai untuk Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2016 realisasi sebesar Rp.2.382.440.767 hal ini menyebabkan ketidak sesuaian antara jumlah Belanja Barang dan Jasa di LRA dan CALK, sedangkan menurut PP 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran II PSAP No 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang di sajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (LRA DAN CALK) PADA KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BATANGHARI (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah).**

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

1. Data primer yaitu : data yang peroleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan

untuk selanjutnya di olah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang di gunakan hasil wawancara berupa Tanya jawab langsung dengan Pejabat Penata usaha Keuangan–Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari.

2. Data sekunder yaitu: data yang telah di olah sehingga lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang akurat dan mengarah kepada kebenaran diperlukan pembuktian penelitian maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang terkait.

2. Studi Pustaka

Mempelajari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan di as dalam laporan ini.

1.4.3 Metode Analisis

- a. Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut.
- b. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua digunakan Metode Deduktif yaitu data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa kembali dengan menggunakan teori-teori yang berlaku sebagai alat analisis yang berguna dalam mengambil suatu kesimpulan.

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Analisis

Menurut kamus besar bahasa indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut kamus akuntansi Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

Pengertian analisis menurut para ahli :

- a) Dwi Prastowo Darminto & Rifka Julianty Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- b) Wiradi Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya.

2.2 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor”

Menurut Deddi nordiawan (2012: 151) Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.. Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi epektifitas, efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang di terbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat di bandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau di bandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Pengeluaran belanja daerah dalam laporan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan keuangan Pemerintah memberikan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan yang dilakukan Pemerintah. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara realisasi terhadap anggaran sekaligus prestasi kinerja yang di capai. Dengan informasi ini, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah di raih oleh organisasi Pemerintah melalui efiktifitas dan efisiensi belanja yang di dihasilkan. Apabila informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa pada suatu periode tersebut terjadi efiktifitas dan efisiensi belanja, maka hal tersebut akan mendorong pertumbuhan Negara.

Menurut SAP, tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagaibukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus, tujuan khusus penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.3 Stuktur Laporan Keuangan

Struktur laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi lima :

1. Neraca

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Neraca Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2. Laporan Realisasi Anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Manfaat Informasi Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- c) Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

(c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Format Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut :

Tabel 2.1
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16		xxx	xxx	xxx	xxx
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
21		xxx	xxx	xxx	xxx
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
27		xxx	xxx	xxx	xxx
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	Xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	Xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29s/d 31)	xxx	xxx	xxx	Xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26+ 32)	xxx	xxx	xxx	Xxx
34		xxx	xxx	xxx	Xxx

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	Xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xxx	Xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xxx	Xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xxx	Xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	Xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxx	xxx	xxx	Xxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	Xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	Xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	Xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	Xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46s/d51)	xxx	xxx	xxx	Xxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	Xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d55)	xxx	xxx	xxx	Xxx
57	JUMLAH BELANJA (43+ 52+ 56)	xxx	xxx	xxx	Xxx
58		xxx	xxx	xxx	Xxx
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	Xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	Xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61s/d 63)	xxx	xxx	xxx	Xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	xxx	xxx	Xxx
66					
67	SURFLUS/DEFISIT				
68					
69	PEMBIAYAAN				
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71					
72	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xxx	Xxx
73	Pencairan dana cadangan	xxx	xxx	xxx	Xxx
74	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xxx	Xxx
75	Pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat	xxx	xxx	xxx	Xxx
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
76	Pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
77	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bank	xxx	xxx	xxx	Xxx

78	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank	xxx	xxx	xxx	Xxx
79	Pinjaman dalam negeri-obligasi	xxx	xxx	xxx	Xxx
80	Pinjaman dalam negeri-lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
81	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara	xxx	xxx	xxx	Xxx
82	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah	xxx	xxx	xxx	Xxx
83	Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerahlainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
84	Jumlah penerimaan (71 s/d 82)	xxx	xxx	xxx	Xxx
85		xxx	xxx	xxx	Xxx
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	Xxx
87	Pembentukan dana cadangan	xxx	xxx	xxx	Xxx
88	Penyertaan modal pemerintah daerah	xxx	xxx	xxx	Xxx
89	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri- pemerintah pusat	xxx	xxx	xxx	Xxx
90	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
91	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bank	xxx	xxx	xxx	Xxx
92	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank	xxx	xxx	xxx	Xxx
93	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-obligasi	xxx	xxx	xxx	Xxx
94	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
95	Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara	xxx	xxx	xxx	Xxx
96	Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah	xxx	xxx	xxx	Xxx
97	Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya	xxx	xxx	xxx	Xxx
98	Jumlah pengeluaran (s/d)	xxx	xxx	xxx	Xxx
99	PEMBIAYAAN NETO (S/D)	xxx	xxx	xxx	Xxx
100		xxx	xxx	xxx	Xxx
101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (s/d)	xxx	xxx	xxx	Xxx

(sumber :lampiran I peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 PSAP 02.C)

3. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan /menyajikan /menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi Makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

PEMBAHASAN

3.1 Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Batanghari

Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Batanghari merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada diwilayah Pemerintahan Kabupaten Batanghari yang dimana berfungsi sebagai pelayanan masyarakat khususnya pada bidang Informasi. Pada tahun 2016 Kantor Pengelola Data Elektronik menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan komponen laporan keuangan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, namun terlihat dari hasil kinerja penyajian laporan keuangan pada tahun 2016 penulis menemukan dua kesalahan penyajian yang dilakukan oleh Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Batanghari.

Kantor Pengelolaan Data Elektronik melakukan penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam melakukan Format penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pengelolaan Data Elektronik tidak mencantumkan beberapa

rekening seperti, Pendapatan, Belanja Tidak Terduga, transfer dan Pembiayaan, serta dalam penyajian belanja barang dan jasa pada Catatan Atas Laporan Keuangan tidak sesuai dengan angka yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran.

3.1.1 Penyajian LRA tidak sesuai dengan format Penyajian LRA pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Terlihat dalam penyajian laporan keuangan oleh Kantor Pengelola Data Elektronik, format penyajian LRA yang di sajikan terdiri dari Belanja yang terbagi menjadi dua yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Bendahara Kantor Pengelola Data Elektronik tidak mencantumkan beberapa rekening seperti, Pendapatan, Belanja Tidak Terduga, transfer dan Pembiayaan pada Format Laporan Realisasi Anggaran dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 Dan 2015
SKPD: 1.25.01.- Kantor Pengelola Data Elektronika

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	BELANJA	4.120.002.810,76	3.999.851.048,00	97,08	2.228.317.098,00
2	BELANJA OPERASI	3.411.722.810,76	3.331.874.048,00	97,66	2.229.992.098,00
3	Belanja Pegawai	950.105.272,76	948.123.474,00	99,79	867.535.526,00
4	Belanja gaji dan tunjangan	876.572.772,76	874.615974,00	99,78	XXX
5	Gaji pokok PNS/Uang refresent	666.389.190,00	666.246.900,00	99,98	XXX
6	Tunjangan keluarga	73.673.556,00	73.419.298,00	99,65	XXX
7	Tunjangan jabatan	44.613.900,00	43.390.000,00	97,26	XXX
8	Tunjangan fungsional umum	21.589.475,00	21.515.000,00	99,66	XXX
9	Tunjangan beras	42.742.644,50	42.582.960,00	99,63	XXX
10	Tunjangan pph/Tunjangan Khusus	5.239.408,33	5.220.683,00	99,64	XXX
11	Pembulatan gaji	8.228,90	8.214,00	99,82	XXX
12	Iuran jaminan kesehatan	19.235.948,03	19.154.053,00	99,63	XXX
13	Tunjangan kecelakaan	1.369.075,00	1.363.941,00	99,63	XXX
14	Tunjangan kematian	1.711.347,00	1.704.925,00	99,62	XXX
15	Belanja tambahan penghasilan PNS	73.532.500,00	73.507.500,00	99,97	XXX
16	Tunjangan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	73.532.500,00	73.507.500,00	99,97	XXX
17	Belanja barang dan jasa	2.461.617.538,00	2.383.750574,00	96,84	1.362.456.572,00
18	Belanja bahan pakai habis	64.552.630,00	62.712.030,00	97,15	XXX

19	Belanja alat tulis kantor	37.527.550,00	37.136.950,00	98,96	XXX
20	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.321.600,00	6.321.600,00	100	XXX
21	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100	XXX
22	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.453.480,00	4.453.480,00	100	XXX
23	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	12.550.000,00	89,64	XXX
24	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	100	XXX
25	Belanja bahan/ material	36.201.000,00	20.843.000,00	57,58	XXX
26	Belanja perlengkapan kegiatan	36.201.000,00	20.843.000,00	57,58	XXX
27	Belanja jasa kantor	1.330.225.000,00	1.321.180.726,00	99,32	XXX
28	Belanja telepon	2.400.000,00	2.092.943,00	87,21	XXX
29	Belanja listrik	30.200.000,00	28.994.679,00	96,01	XXX
30	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	100	XXX
31	Belanja kawat/faksimili/internet	947.000.000,00	945.013.104,00	99,79	XXX
32	Belanja transportasi dan akomodasi	152.000.000,00	150.000.000,00	98,68	XXX
No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
33	Belanja jasa kerja	192.775.000,00	189.980.000,00	98,55	XXX
34	Belanja publikasi	1.650.000,00	900.000,00	54,55	XXX
35	Belanja perawatan kendaraan bermotor	69.320.000,00	46.948.725,00	67,73	XXX
36	Belanja jasa service	5.580.000,00	3.780.000,00	67,74	XXX
37	Belanja penggantian suku cadang	18.750.000,00	18.355.000,00	97,89	XXX
38	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	43.440.000,00	23.854.425,00	54,91	XXX
39	Belanja pajak kendaraan bermotor	1.550.000,00	959.300,00	61,89	XXX
40	Belanja cetak dan pengadaan	21.296.508,00	18.767.508,00	88,12	XXX
41	Belanja cetak	11.546.508,00	10.592.508,00	91,74	XXX
42	Belanja pengadaan	6.750.000,00	5.800.000,00	85,93	XXX
43	Belanja penjiwaan	3.000.000,00	2.375.000,00	79,17	XXX
44	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100	XXX
45	Belanja sewa tenda	7.500.000,00	7.500.000,00	100	XXX
46	Belanja makanan dan minuman	13.685.000,00	12.569.800,00	91,85	XXX
47	Belanja makanan dan minuman rapat	5.900.000,00	4.784.800,00	81,10	XXX
48	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.785.000,00	7.785.000,00	100	XXX
49	Belanja pakaian dinas dan atributnya	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00	XXX
50	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00	XXX
51	Belanja perjalanan dinas	379.937.400,00	376.413.785,00	99,07	XXX
52	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.297.400,00	40.176.700,00	99,70	XXX
53	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	339.640.000,00	336.237.085,00	99,00	XXX
54	Belanja pemeliharaan	54.100.000,00	54.020.000,00	99,85	XXX
55	Belanja pemeliharaan komputer dan jaringan	46.600.000,00	46.520.000,00	99,83	XXX
56	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100	XXX
57	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	73.750.000,00	98,33	XXX
58	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan honorarium PNS	75.000.000,00	73.750.000,00	98,33	XXX
59	Honorarium PNS	326.580.000,00	306.125.000,00	93,74	XXX
60	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	955.000,00	955.000,00	100	XXX

61	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	900.000,00	900.000,00	100	XXX
62	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)	15.825.000,00	15.750.000,00	99,53	XXX
63	Honorarium kordinator/operator	240.600.000,00	226.620.000,00	94,19	XXX
64	Honorarium pnengguna anggaran	18.000.000,00	17.100.000,00	95,00	XXX
65	Honorarium PPK-SKPD	18.000.000,00	12.500.000,00	69,44	XXX
66	Honorarium bendahara pengeluaran	7.200.000,00	7.200.000,00	100	XXX
67	Honorarium pengelolah inventaris barang daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100	XXX
68	Honorarium pejabat pembuat bendahara pengeluaran	1.400.000,00	1.400.000,00	100	XXX
69	Honorarium pengurus barang daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100	XXX
70	Honorarium pembantu bendahara pengeluaran	9.600.000,00	9.600.000,00	100	XXX
71	Honorarium tim pemeriksaan barang	2.100.000,00	2.100.000,00	100	XXX
72	Honorarium non PNS	67.620.000,00	67.620.000,00	100	XXX
73	Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	30.000.000,00	30.000.000,00	100	XXX
No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
74	Honorarium non PNS lainnya	37.620.000,00	37.620.000,00	100	XXX
75	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	9.600.000,00	9.600.000,00	100	XXX
76	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	9.600.000,00	9.600.000,00	100	XXX
77					
78	BELANJA MODAL	708.300.000,00	667.977.000,00	94,31	58.325.000,00
79	Belanja modal peralatan dan mesin	314.300.000,00	309.000.000,00	98,31	58.325.000,00
80	Belanja modal pengadaan alat kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	100	XXX
81	Belanja modal pengadaan mesin ketik	3.500.000,00	3.500.000,00	100	XXX
82	Belanja modal pengadaan komputer	310.800.000,00	305.500.000,00	98,29	XXX
83	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan	174.000.000,00	170.000.000,00	97,70	XXX
84	Belanja modal pengadaan scanner	13.500.000,00	13.500.000,00	100	XXX
85	Belanja modal perangkat lunak pengembangan aplikasi	123.300.000,00	122.000.000,00	98,95	XXX
86	Belanja modal gedung dan bangunan	394.000.000,00	358.977.000,00	91,11	XXX
87	Belanja modal pengadaan bangunagedung tempat kerja	394.000.000,00	358.977.000,00	91,11	XXX
88	Belanja modal pengadaan bangunan gedung instalasi	394.000.000,00	358.977.000,00	91,11	XXX
89	SURPLUS,(DEFISIT)	(4.120.022.810,76)	(3.999.851.048,00)	97,08	XXX
					XXX

(Sumber : Laporan Keuangan KPDE 2016 Kabupaten Batanghari)

Ketidaksesuaian Format penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Kantor Pengelola Data Elektronik di atas disebabkan karena bendahara Kantor Pengelola Data Elektronik menganggap beberapa rekening tersebut seperti, Pendapatan, Belanja tak terduga, Transfer dan Pembiayaan tidak dibutuhkan dan tidak perlu untuk di cantumkan dalam format penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik, namun hal tersebut ternyata menyalahi Format penyajian Laporan Realisasi Anggaran Menurut PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

3.1.2 Penyajian Belanja Barang Dan Jasa Pada LRA Dan Calk Tidak Sama.

CALK merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Terlihat dari penjelasan tersebut pos belanja barang dan

jasa angka penyajian yang tercantum dalam CALK tidak sesuai dengan yang tercantum pada LRA yaitu pada LRA tahun anggaran 2016 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.383.750.574 kemudian pada CALK tahun anggaran 2016 angka realisasi untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.382.440.767 hal ini menyebabkan ketidak sesuaian antara jumlah belanja barang dan jasa di LRA dan CALK selisih sebesar Rp.1.309.807. Terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Belanja Barang Dan Jasa

	TAHUN ANGGARAN 2016	REALISASI 2016
LRA	Rp.2.461.617.538.00,-	Rp.2.383.750.574.00,-
Calk	Rp.2.461.617.538.00,-	Rp.2.382.440.767.00,-
	Selisih LRA dan Calk	Rp.1.309.807,-

(Sumber : Laporan Keuangan KPDE 2016 Kabupaten Batanghari)

3.2 Penyajian Laporan Keuangan Kantor Pengelola Data Elektronik Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah BAB II penerapan standar akuntansi pemerintah pasal 6 ayat 1 pemerintah menyusun sitem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan format yang telah diamanatkan Pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Ilustrasi PSAP 02.C.

3.2.1 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Setelah menganalisis format penyajian Laporan Keuangan pada Kantor Pengelola Data Elektronik, terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian dalam penyajian Komponen laporan Keuangan salah satunya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
DAN 2016

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
27		xxx	xxx	xxx	xxx
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
34					

35	BELANJA	4.120.002.810,76	3.999.851.048,00	97,08	2.288.317.098,00
36	BELANJA OPERASI	3.411.722.810,76	3.331.874.048,00	97,66	2.229.992.098,00
37	Belanja Pegawai	950.105.272,76	948.123.474,00	99,79	867.535.526,00
38	Belanja gaji dan tunjangan	876.572.772,76	874.615.974,00	99,78	795.650.526,00
39	Gaji pokok PNS/Uang refresent	666.389.190,00	666.246.900,00	99,98	588.554.200,00
40	Tunjangan keluarga	73.673.556,00	73.419.298,00	99,65	67.781.444,00
41	Tunjangan jabatan	44.613.900,00	43.390.000,00	97,26	44.460.000,00
42	Tunjangan fungsional umum	21.589.475,00	21.515.000,00	99,66	20.775.000,00
43	Tunjangan beras	42.742.644,50	42.582.960,00	99,63	40.235.740,00
44	Tunjangan pph/Tunjangan Khusus	5.239.408,33	5.220.683,00	99,64	13.834.841,00
45	Pembulatan gaji	8.228,90	8.214,00	99,82	8.576,00
46	Iuran jaminan kesehatan	19.235.948,03	19.154.053,00	99,63	18.248.430,00
47	Tunjangan kecelakaan	1.369.075,00	1.363.941,00	99,63	778.797,00
48	Tunjangan kematian	1.711.347,00	1.704.925,00	99,62	973.498,00
49	Belanja tambahan penghasilan PNS	73.532.500,00	73.507.500,00	99,97	71.885.000,00
No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
50	Tunjangan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	73.532.500,00	73.507.500,00	99,97	71.885.000,00
51	Belanja barang dan jasa	2.461.617.538,00	2.383.750.574,00	96,84	1.362.456.572,00
52	Belanja bahan pakai habis	64.552.630,00	62.712.030,00	97,15	40.048.590,00
53	Belanja alat tulis kantor	37.527.550,00	37.136.950,00	98,96	27.067.600,00
54	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.321.600,00	6.321.600,00	100	4.039.400,00
55	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100	1.680.000,00
56	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.453.480,00	4.453.480,00	100	3.791.590,00
57	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	12.550.000,00	89,64	2.470.000,00
58	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	100	1.000.000,00
59	Belanja bahan/ material	36.201.000,00	20.843.000,00	57,58	10.555.000,00
60	Belanja perlengkapan kegiatan	36.201.000,00	20.843.000,00	57,58	10.555.000,00
61	Belanja jasa kantor	1.330.225.000,00	1.321.180.726,00	99,32	280.720.658,00
62	Belanja telepon	2.400.000,00	2.092.943,00	87,21	2.660.900,00
63	Belanja listrik	30.200.000,00	28.994.679,00	96,01	30.857.758,00
64	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	100	3.850.000,00
65	Belanja kawat/faksimili/internet	947.000.000,00	945.013.104,00	99,79	238.852.000,00
66	Belanja transportasi dan akomodasi	152.000.000,00	150.000.000,00	98,68	4.500.000,00
67	Belanja jasa kerja	192.775.000,00	189.980.000,00	98,55	XXX
68	Belanja publikasi	1.650.000,00	900.000,00	54,55	XXX
69	Belanja perawatan kendaraan bermotor	69.320.000,00	46.948.725,00	67,73	44.652.929,00
70	Belanja jasa service	5.580.000,00	3.780.000,00	67,74	5.280.000,00
71	Belanja penggantian suku cadang	18.750.000,00	18.355.000,00	97,89	14.515.000,00
72	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	43.440.000,00	23.854.425,00	54,91	24.076.929,00
73	Belanja pajak kendaraan bermotor	1.550.000,00	959.300,00	61,89	781.000,00
74	Belanja cetak dan pengadaan	21.296.508,00	18.767.508,00	88,12	13.923.358,00
75	Belanja cetak	11.546.508,00	10.592.508,00	91,74	8.033.358,00
76	Belanja pengadaan	6.750.000,00	5.800.000,00	85,93	4.740.000,00

77	Belanja penjiilidan	3.000.000,00	2.375.000,00	79,17	1.150.000,00
78	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100	7.500.000,00
79	Belanja sewa tenda	7.500.000,00	7.500.000,00	100	7.500.000,00
80	Belanja makanan dan minuman	13.685.000,00	12.569.800,00	91,85	11.873.000,00
81	Belanja makanan dan minuman rapat	5.900.000,00	4.784.800,00	81,10	2.493.000,00
82	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.785.000,00	7.785.000,00	100	8.880.000,00
83	Belanja pakaian dinas dan atributnya	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00	XXX
84	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00	XXX
85	Belanja perjalanan dinas	379.937.400,00	376.413.785,00	99,07	231.638.037,00
86	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.297.400,00	40.176.700,00	99,70	19.974.900,00
87	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	339.640.000,00	336.237.085,00	99,00	211.663.137,00
88	Belanja pemeliharaan	54.100.000,00	54.020.000,00	99,85	44.050.000,00
89	Belanja pemeliharaan komputer dan jaringan	46.600.000,00	46.520.000,00	99,83	38.500.000,00
No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
90	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100	5.550.000,00
91	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	73.750.000,00	98,33	178.300.000,00
92	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan honorarium PNS	75.000.000,00	73.750.000,00	98,33	178.300.000,00
93	Honorarium PNS	326.580.000,00	306.125.000,00	93,74	327.535.000,00
94	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	955.000,00	955.000,00	100	955.000,00
95	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	900.000,00	900.000,00	100	XXX
96	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)	15.825.000,00	15.750.000,00	99,53	22.275.000,00
97	Honorarium kordinator/operator	240.600.000,00	226.620.000,00	94,19	242.445.000,00
98	Honorarium penngguna anggaran	18.000.000,00	17.100.000,00	95,00	19.650.000,00
99	Honorarium PPK-SKPD	18.000.000,00	12.500.000,00	69,44	13.200.000,00
100	Honorarium bendahara pengeluaran	7.200.000,00	7.200.000,00	100	7.200.000,00
101	Honorarium pengelola inventaris barang daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100	6.000.000,00
102	Honorarium pejabat pembuat bendahara pengeluaran	1.400.000,00	1.400.000,00	100	XXX
103	Honorarium pengurus barang daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100	6.000.000,00
104	Honorarium pembantu bendahara pengeluaran	9.600.000,00	9.600.000,00	100	9.600.000,00
105	Honorarium tim pemeriksaan barang	2.100.000,00	2.100.000,00	100	210.000,00
106	Honorarium non PNS	67.620.000,00	67.620.000,00	100	127.200.000,00
107	Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	30.000.000,00	30.000.000,00	100	75.000.000,00
108	Honorarium non PNS lainnya	37.620.000,00	37.620.000,00	100	52.200.000,00
109	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	9.600.000,00	9.600.000,00	100	14.400.000,00
110	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	9.600.000,00	9.600.000,00	100	14.400.000,00
111					
112	BELANJA MODAL	708.300.000,00	667.977.000,00	94,31	58.325.000,00
113	Belanja modal peralatan dan mesin	314.300.000,00	309.000.000,00	98,31	58.325.000,00
114	Belanja modal pengadaan alat kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	100	xxx
115	Belanja modal pengadaan mesin ketik	3.500.000,00	3.500.000,00	100	xxx
116	Belanja modal pengadaan komputer	310.800.000,00	305.500.000,00	98,29	9.460.000,00
117	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan	174.000.000,00	170.000.000,00	97,70	7.975.000,00

118	Belanja modal pengadaan scanner	13.500.000,00	13.500.000,00	100	XXX
119	Belanja modal perangkat lunak pengembangan aplikasi	123.300.000,00	122.000.000,00	98,95	XXX
120	Belanja modal gedung dan bangunan	394.000.000,00	358.977.000,00	91,11	XXX
121	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja	394.000.000,00	358.977.000,00	91,11	XXX
122	Belanja modal pengadaan bangunan gedung instalasi	394.000.000,00	358.977.000,00	91,11	XXX
123	SURPLUS/ (DEFISIT)	(4.120.022.810,76)	(3.999.851.048,00)	97,08	(2.288.317.098,00)
124	BELANJA TAK TERDUGA				
125	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
126	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
127	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xxx
No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
128					
129	TRANSFER				
130	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
131	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
132	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
133	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
134				xxx	xxx
135	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	xxx	xxx	xxx	xxx
136	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xxx	xxx
137					
138	PEMBIAYAAN				
139	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
140	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xxx	xxx
141	Pencairan dana cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
142	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
143	Pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
144	Pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
145	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bank	xxx	xxx	xxx	xxx
146	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank	xxx	xxx	xxx	xxx
147	Pinjaman dalam negeri-obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
148	Pinjaman dalam negeri-lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
149	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara	xxx	xxx	xxx	xxx
150	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
151	Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerahlainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
152	Jumlah penerimaan	xxx	xxx	xxx	xxx
153					
154	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
155	Pembentukan dana cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
156	Penyertaan modal pemerintah daerah	xxx	xxx	xxx	xxx

157	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
158	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
159	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bank	xxx	xxx	xxx	xxx
160	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank	xxx	xxx	xxx	xxx
161	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeriobligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
162	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
163	Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara	xxx	xxx	xxx	xxx
164	Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
165	Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
166	Jumlah pengeluaran	xxx	xxx	xxx	xxx
167	PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xxx	xxx
168					
169	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxx	xxx	xxx	xxx
170					

(Sumber :Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 02.C)

3.2.2 Penyajian Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan Calk

Catatan atas Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 4.4
Belanja Barang Dan Jasa

	TAHUN ANGGARAN 2016	REALISASI 2016
LRA	Rp.2.461.617.538.00,-	Rp.2.383.750.574.00,-
Calk	Rp.2.461.617.538.00,-	Rp.2.383.750.574.00,-

(Sumber Dari Catatan Atas Laporan Keuangan KPDE 2016 yang telah diolah)

Berdasarkan uraian Tabel diatas Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara Kantor Pengelola Data Elektronik angka Belanja Barang dan Jasa tidak sama, hal tersebut menyebabkan ketidak sesuaian antara Penyajian angka Belanja Barang dan Jasa di LRA dan CALK sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi pemerintah Calk menjelaskan tentang daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dari pengertian tersebut bendahara Kantor Pengelola Data Elektronik seharusnya menyajikan nilai Belanja Barang dan Jasa yang ada di CALK harus sama seperti angka Belanja Barang dan Jasa yang ada di LRA yakni apabila nilai Belanja Barang dan Jasa di LRA disajikan

sebesar Rp.2.383.750.574.00,- maka Penyajian nilai Belanja Barang dan Jasa di CALK juga harus Rp.2.383.750.574.00,- tetapi terlihat pada laporan keuangan Kantor Pengelola Data Elektronik dalam hal ini Penyajian CALK nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.382.440.767.00,- dan jauh berbeda dengan nilai yang ada di LRA yaitu terjadi selisih sebesar Rp.1.309.807,- bendahara melakukan kesalahan Penyajian hal ini disebabkan kurang ketelitian dan kurang pemahaman dari bendahara Kantor Pengelolah Data elektronik tentang Penyajian laporan keuangan.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahansan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Penyajian laporan keuangan LRA dan Calk pada Kantor Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Batanghari tidak mencantumkan belanja tak terduga pada kolom LRA. Selanjutnya Penyajian Belanja Barang dan Jasa angka yang ada di LRA tidak sesuai dengan angka Belanja Barang dan Jasa pada Calk.
2. Proses Penyajian laporan keuangan LRA dan Calk pada Kantor Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Batanghari belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi pada Penyajian laporan keuangan Kantor Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Batanghari. Adapun saran perbaikan yang penulis berikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya proses Penyajian laporan keuangan pada Kantor Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Batanghari mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Sebaiknya proses Penyajian laporan keuangan pada Kantor Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Batanghari dilakukan oleh orang yang memahami tentang Penyajian laporan keuangan pemerinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Nordiawan, Deddi (2012) *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta. Salemba Empat
- Pemerintah Kabupaten Batanghari.,2015, *Tupoksi Kantor Pengelola Data Elektronik*. Batanghari
- Pemerintah Kabupaten Batanghari.,2017, *Laporan Keuangan Kantor Pengelola Data Elektronik Tahun anggaran 2016*, Muara Bulian
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintah* .
- <http://www.gurupendidikan.co.id/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>
- Sekretariat Dinas KOMINFO,2017, *Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika*, Muara bulian
- Wahyuni Sri.,2016, “*Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang Hari*”. Muara bulian